

Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Widi Mulyadi¹, Nur Fitri Rahmawati²

Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, RT.5/RW.7, Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10530

Email: wd_mulyadi@yahoo.com¹, fitri.alfaruq@gmail.com²

ARTICLE INFO

ABSTRACT

There is a high demand from the community for the government's performance in implementing the procurement of goods/services in an efficient, effective, transparent and accountable manner. Therefore, the implementation of government procurement of goods/services is required to avoid nepotism and corruption. The PBJ process within government agencies is a strategic activity in an effort to provide services to the community or business actors to increase the use of domestic production.

Auctions for the procurement of goods/services are carried out by the government and private parties. Where the government PBJ auction is financed by the APBN, Provincial APBD, and Regency/City APBD, either by self-management or electronic auction, and the Auction for the Procurement of Goods/Services is carried out by the government, all of which are regulated in Presidential Regulation number 54 of 2010.

In realizing an organizational goal, good management is needed, the management of management functions, one of which is the supervisory function, by top management is very decisive in achieving the planned organizational goals. Supervision is one of the efforts to strengthen control, including those carried out by the Central Government and Regional Governments, to avoid irregularities, irregularities, and leakages that will greatly harm local governments in carrying out their functions.

Keywords

Accountability, Efficient, Transparency, and Effective

PENDAHULUAN

Tingginya sebuah tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah didalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, Transparansi, Akuntabilitas. Maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut agar terhindar dari nepotisme, dan korupsi. Proses PBJ dilingkungan instansi pemerintah adalah suatu kegiatan strategis dalam upaya memberi pelayanan kepada masyarakat atau pelaku bisnis peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Maksud dan tujuan pengadaan barang / jasa menurut Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 adalah :

1. Mengatur pendanaan dari APBN / APBD Propinsi atau APBD Kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan lelang / pengadaan
2. Supaya pengadaan barang / jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Penyelenggara pengadaan barang / jasa adalah PA/KPA, PPK, ULP, sedangkan pengguna adalah satuan kerja, atau pengguna anggaran daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa. Sedangkan bagi penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa . Didalam Perpres 54 Tahun 2010 ditegaskan bahwa pengadaan barang / jasa pemerintah, satuan kerja, atau pengguna anggaran daerah / pejabat wajib menerapkan efisien, efektifitas, terbuka dan bersaing, transparansi, berkeadilan tidak berdiskriminatif serta akuntabel.

Dalam memenuhi sebuah pengadaan barang / jasa perlu adanya kebijakan umum oleh karena itu pengguna maupun penyedia yang terkait pelaksanaan lelang atau pengadaan barang / jasa harus mematuhi beberapa etika didalam pelaksanaan lelang sebagai berikut:



1. Efektif, efisiensi, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel sesuai dengan tujuan pengadaan barang / jasa.
2. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
3. Bekerja secara profesional dalam pengadaan barang / jasa.
4. Menerima segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak
5. Menghindari dan mencegah terjadinya diskriminatif secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa (conflict of interest).
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dalam keuangan Negara.

Menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau nepotisme dan kolusi untuk tujuan good governance, sebuah indikator berhasil atau tidaknya pelelangan atau pengadaan terdiri dari beberapa faktor diantaranya :

1. Ketetapan waktu dalam kegiatan lelang
2. Biaya anggaran yang sudah ditentukan atau dibuat,
3. Memenuhi syarat spesifikasi yang telah ditentukan oleh pokja,
4. Adanya jaminan K3 .

Sebuah kesuksesan didalam lelang atau pengadaan tidak mudah dilaksanakan dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan dari para pihak yang terlibat langsung didalam pproses lelang atau pengadaan. Didalam Pelaksanaan lelang atau pengadaan terdapat beberapa tantangan didalam kebijakan-kebijakan pengadaan barang / jasa yang secara sasat mata tidak adanya keterbuka an dan transparan.

Kondisi saat ini harus adanya sebuah ide-ide atau inovasi baru dalam proses penerapan pengadaan barang/jasa agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum atau peraturan yang berlaku. Disisi lain, sebuah terobosan ide-ide, dan inovasi baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah pada perbaikan kebijakan kelembagaan, yaitu dari aplikasi e-procurement dan aplikasi monitoring dan evaluasi pengadaan barang atau jasa, melalui sistem pengadaan barang / jasa pemerintah dan aplikasi monitoring, evaluasi pengadaan barang / jasa yang dikelola secara elektronik berbasis web yang dibuat oleh LKPP.

Dari fenomena yang terjadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti manajemen stratejik, kepemimpinan, budaya organisasi, monitoring dan evaluasi, serta masih banyak lagi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Didalam mewujudkan suatu tujuan organisasi sangat diperlukannya manajemen yang baik, dan fungsi pengawasan oleh manajemen puncak. Didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan, maka pengawasan merupakan salah satu usaha untuk memperkuat pengendalian, yang dimana Pemerintah Pusat / Daerah dapat menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan kebocoran didalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sangat merugikan pemerintah pusat / daerah didalam melaksanakan fungsinya. Henry Fayol dalam Harahap (2001: 10) mengemukakan bahwa pengawasan atau monitoring adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Suatu proses didalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat relatif berbeda dengan swasta, dimana perbedaan yang paling mendasar adalah dalam hal pembiayaannya. Dimana seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik sebagian ataupun keseluruhan, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang berlaku mulai 1 Januari 2011. Menurut Peraturan Presiden, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi(K/L/D/I), yang prosesnya dimulai dari susunan perencanaan kebutuhan barang/jasa sampai diselesaikannya seluruh kegiatan agar dapat memperoleh barang/jasa. Tujuan pengadaan barang atau jasa adalah memperoleh barang yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan tujuan monev dilakukan pengidentifikasian hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi sebuah masalah yang timbul maka dapat langsung diatas
2. Melakukan sebuah penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan program
3. Mendapatkan tolak ukur kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
4. Menyesuaikan sebuah kegiatan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan pengadaan barang / jasa.

Tujuan Evaluasi agar dapat menghasilkan barang / jasa yang tepat, agar dapat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia atau (value for money). Selain itu menurut para ahli:

1. Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi (Jones, 1994 : 357).
2. Boyle (dalam Suharto, 2005:120). Sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Sosial masukan
 - 2) Sosial keluaran
 - 3) Sosial hasil

Evaluasi dapat mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Dapat Mengidentifikasi pencapaian tujuan pengadaan
2. Mengukur langsung pola kerja yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan program
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi kegiatan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan pengadaan barang / jasa..

Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu :

1. Indikator input,
2. Indikator process,
3. Indikator outputs
4. Indikator outcomes

Jika dilihat dari tahapan-tahapan secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan

Evaluasi digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Melakukan sebuah analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana..

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Melaporkan jalannya sebuah kegiatan atau proses pengadaan barang / jasa yang dialami, serta dapat menilai bagaimana harus mengatasi kendala tersebut.

Berikut ini merupakan laporan Nasional PBJ(Tahunan) dari Aplikasi monev.lkpp.go.id

Laporan Nasional PBJ (Tahunan)

Laporan Nasional
Tahun: 2021

Tampilkan data untuk instansi:

Rencana Paket Pengadaan

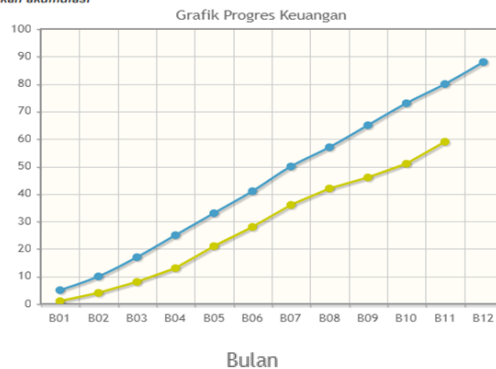
Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										S
	<= Rp. 200 juta		> Rp. 200 juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar		
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	
BARANG	1.075.591	26.931.798	55.111	36.896.941	8.046	59.284.470	192	13.851.366	137	33.341.397	-
KONSTRUKSI	224.879	30.187.517	63.658	45.916.723	13.235	117.598.259	267	19.177.694	206	51.655.360	-
KONSULTANSI	173.416	7.077.565	10.880	6.678.418	1.104	8.494.010	3	568.476	5	4.334.557	-
JASA LAINNYA	375.153	11.955.527	23.872	15.249.240	3.473	27.304.886	61	4.188.678	41	16.356.303	-
Jumlah	1.849.039	76.152.408	153.521	104.741.324	25.858	210.681.626	528	37.796.215	389	105.687.619	1.319,59

Data pagu ditampilkan dalam satuan milyar rupiah *) Data diperbaharui otomatis. Setiap Jam 00:00

Progres Keuangan

- Progres Keuangan untuk seluruh belanja
- Target: merupakan disbursement plan atau rencana penyerapan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara klik Perbaruan Progres Keuangan
- Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran dengan cara klik lapor pada setiap bulannya
- Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi
- Format pengisian merupakan nilai nominal (Rp) tanpa menggunakan titik/koma

Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi



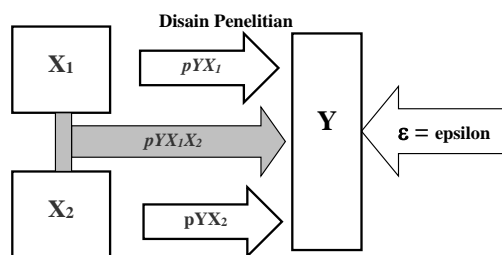
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	5.47%	10.94%	17.44%	25.85%	33.93%	41.97%	50.66%	57.62%	65.06%	73.30%	80.31%	88.30%
Realisasi	1.58%	4.15%	8.27%	13.75%	21.20%	28.99%	36.25%	42.39%	46.91%	51.95%	59.10%	-

Proses dasar dalam penerapan monitoring dan evaluasi meliputi 3 tahapan yaitu :

1. Menetapkan standar pelaksanaan;
2. Pengukuran pelaksanaan;
3. Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dengan metoda penelitian deskriptif kuantitatif, kedua metoda tersebut, konsep pengukuran dalam penelitian ini dirancang dengan model hubungan :



Sebuah konsep hubungan antar variabel yang akan diteliti, Desain Penelitian di atas dapat penulis deskripsikan sebagai berikut :

1. X1 adalah variabel bebas Monitoring yang diasumsikan mempunyai hubungan yang berpengaruh positif terhadap variabel terikat Y.
2. X2 adalah variabel bebas Evaluasi yang juga diasumsikan mempunyai hubungan yang berpengaruh positif terhadap variabel terikat Y.
3. Y adalah variabel terikat Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. PYX1 adalah parameter struktural adalah model pengukuran searah yang akan menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y.
5. pYX2 adalah parameter struktural adalah model pengukuran searah yang akan menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas X2 terhadap variabel terikat Y.
6. pYX1X2 adalah parameter struktural adalah model pengukuran ganda searah yang akan menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas X1 dan X2 secara bersamaan terhadap variabel terikat Y.
7. ε (Epsilon) adalah faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi variabel terikat Y, namun tidak diteliti.

Berdasarkan pendekatan teoritik yang telah penulis paparkan, selanjutnya operasionalisasi variabel penelitian ini dijabarkan dengan definisi dan kisi-kisi operasional variabel penelitian di bawah ini :

1. Monitoring (X1)

- 1) Definisi Konseptual : Monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen proyek.
- 2) Definisi Operasional : Definisi operasional variabel adalah penjabaran variabel tersebut menjadi 3 dimensi permasalahan yang meliputi dimensi rencana yang ditetapkan, dimensi perintah yang dikeluarkan, dan dimensi prinsip yang dianut. Ketiga dimensi permasalahan ini dijabarkan lagi menjadi 12 indikator obyek permasalahan yang diteliti. Berdasarkan 12 indikator tersebut disusun 12 item pernyataan (kuesioner) dengan format Skala Likert. Dengan Format Skala Likert ini didapat responsi (jawaban) dari sampel penelitian yang selanjutnya disusun menjadi Distribusi Jawaban Responden. Kisi – kisi operasional variabel untuk variabel Monitoring dijelaskan dalam tabel berikut:

VARIABEL PENELITIAN	DIMENSI	INDIKATOR	No. Item
Monitoring X1 Henry Fayol dalam Harahap (2001: 10)	1. Rencana yang ditetapkan	• menghimpun data	01
		• aspek-aspek yang akan dimonitor	02
		• faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan	03
		• biaya monitoring	04
	2. Perintah yang dikeluarkan	• Pengumpulan data monitoring	05
		• Penyimpanan data monitoring	06
		• Pengambilan data monitoring	07
		• Analisis data monitoring	08
	3. Prinsip yang dianut	• Fokus monitoring	09
		• Titikberat monitoring	10
		• Cakupan usaha monitoring	11
		• Kontribusi monitoring	12

2. Evaluasi (X2)

1) Definisi

Konseptual : Evaluasi program merupakan salah satu pelaksanaan program. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan, evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

- 2) Definisi Operasional : Definisi operasional variabel adalah penjabaran variabel tersebut menjadi 3 dimensi permasalahan yang meliputi dimensi keluaran (output), dimensi hasil (outcomes), dan dimensi dampak (impacts). Ketiga dimensi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 12 indikator permasalahan yang diteliti. Keduabelas indikator tersebut selanjutnya dijadikan 12 item Kuesioner (pertanyaan) yang disusun dengan Format Skala Likert. Dengan Format Skala Likert ini didapat responsi (jawaban) dari sampel penelitian yang selanjutnya disusun menjadi Distribusi Jawaban Responden. Kisi – kisi operasional variabel untuk variabel Evaluasi dijelaskan dalam tabel berikut:

VARIABEL PENELITIAN	DIMENSI	INDIKATOR	No. Item
Evaluasi X2 Suharto, (2005:120)	1. Keluaran (output)	• Pencapaian tujuan	01
		• Dampak langsung	02
		• Mengetahui konsekuensi-konsekuensi	03
		• Menganalisa konsekuensi-konsekuensi	04
	2. Hasil (outcomes)	• Efisiensi	05
		• Efektif	06
		• Transparansi	07
		• Ekuntabel	08
	3. Dampak (impacts)	• Segi pelaporan lebih terbuka	09
		• Memastikan pelaksanaan PBJP	10
		• Pengadaan Tereksekusi dengan sesuai	11
		• Manfaat nyata bagi Stakeholders	12

3. Efektifitas Pengadaan Barang (Y)

1) Definisi Konseptual :

Efektivitas adalah suatu fungsi dari dua hal yang meliputi apa yang dihasilkan atau diproduksi dan aset yang menghasilkannya atau kapasitas produksi. Maka secara khusus dapat diartikan efektivitas

meliputi ratio antara apa yang diproduksi dan apa yang memproduksi. Efektivitas adalah suatu konsep yang luas yang tidak hanya meliputi internal organisasi namun juga meliputi eksternal organisasi dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi

2) Definisi Operasional :

Definisi operasional variabel adalah penjabaran variabel tersebut menjadi 2 dimensi permasalahan yang meliputi dimensi Tingkat pencapaian hasil dan dimensi Kesesuaian Hasil. Kedua dimensi permasalahan ini dijabarkan lagi menjadi 12 indikator obyek permasalahan yang diteliti. Berdasarkan 12 indikator tersebut disusun 12 item pernyataan (kuesioner) dengan format Skala Likert. Dengan Format Skala Likert ini didapat responsi (jawaban) dari sampel penelitian yang selanjutnya disusun menjadi Distribusi Jawaban Responden. Kisi – kisi operasional variabel untuk variabel Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan dalam tabel berikut:

VARIABEL PENELITIAN	DIMENSI	INDIKATOR	No. Item
Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Y Audit Commissions (1986)	1. Tingkat pencapaian hasil	▪ Program	1,2,3
		▪ Aktivitas	4,5,6
	2. Kesesuaian hasil	▪ Fungsi	7,8,9
		▪ Organisasi	10,11,12

Sedangkan Sampel penelitian dimaksudkan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Melihat jumlah populasi relatif kecil/ sedikit, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 42 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel ini disebut dengan teknik sensus. Dan teknik pengumpulan data menggunakan:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (tinjauan buku/dokumen) adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji atau mengutip berbagai teori, pendapat, data dari sejumlah buku, dokumen dan bahan-bahan rujukan lainnya yang dianggap relevan dan mendukung topik dan keperluan penelitian serta proses pembahasan. Studi Kepustakaan ini pada dasarnya mengumpulkan sejumlah teori, pendapat atau data fungsional (purposive data) yang berguna untuk penyusunan Bab Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran, untuk mendukung rancangan penelitian serta untuk menyusun Deskripsi Obyek Penelitian. Instrumen yang penulis gunakan untuk melakukan pendekatan Studi Kepustakaan ini adalah Catatan Studi Kepustakaan, yang disusun dengan pokok-pokok catatan sebagai berikut :

- 1) Judul>Nama Buku/Dokumen;
- 2) Teori/Pendapat/Data yang dikutip;
- 3) Manfaat Teori/Pendapat/Data yang dikutip;
- 4) Catatan Khusus tentang teori, pendapat, data tersebut

2. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian dengan mengunjungi lokasi penelitian, yaitu Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan teknik ini penulis berupaya memahami kondisi obyektif berbagai hal yang menjadi sasaran penelitian. Pengamatan langsung dimaksudkan untuk memperoleh persepsi dan interpretasi situasional terhadap obyek-obyek yang diamati. Persepsi dan interpretasi ini berguna untuk memperkuat interpretasi dalam proses analisis kualitatif. Instrumen Observasi ini berupa Catatan Observasi yang terdiri dari catatan mengenai :

- 1) Waktu/Tempat Observasi;
- 2) Obyek-Obyek Observasi;
- 3) Kontak Person; dan
- 4) Catatan Observasi

3. Kuesioner Penelitian

Alat pengumpul data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah angket atau Kuesioner Penelitian. Dengan alat pengumpulan data ini, penulis berupaya menggali responsi dari responden yang menjadi sampel. Penelitian yang penulis ajukan kepada responden terdiri dari Kelompok Pernyataan Variabel Bebas X1 dan X2 . Untuk mendapatkan responsi dari para responden, penulis melakukan penyebaran kuesioner yang disebarikan kepada 42 responden. Kuesioner yang penulis sebarikan tersebut berupa pernyataan yang berjumlah 36 sebaran butir pernyataan serta pertanyaan pendukung.

Dengan kelompok - kelompok pernyataan di atas, selanjutnya untuk mengetahui valid atau tidak valid setiap pertanyaan yang diajukan, penulis akan mengadakan pengujian validitas instrumen dan pengujian reliabilitas instrumen, agar diketahui seberapa banyak item kuesioner yang valid dan kuesioner yang di drop, serta mengetahui juga reliabilitas kuesioner penelitian tersebut. Jawaban atas pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada para responden penelitian disusun dengan menggunakan format Skala Likert. Para pelanggan menjawab dalam berbagai tingkatan bagi setiap butir kepuasan, format tipe Likert bisa dipergunakan. R.A. Likert (1932) mengembangkan prosedur penskalaan dimana skala mewakili suatu kontinum bipolar. Pada ujung sebelah kiri (dengan angka rendah) menggambarkan suatu jawaban yang negatif sedangkan ujung kanan (dengan angka besar) menggambarkan yang positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Monitoring dan evaluasi dalam proses pengadaan

Setiap permasalahan yang muncul dari lelang atau pengadaan diperlukan adanya monev sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat agar dapat menyelesaikan masalah didalam proses lelang atau pengadaan, sehingga setiap proses dalam monitoring dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari proses pelelangan atau pengadaan barang/jasa. Didalam pelaksanaan monitoring terdapat indikator - indikator yang terpisahkan. Sedangkan evaluasi atau analisa penilaiannya terhadap informasi yang telah dikumpulkan dalam proses monitoring tersebut. Jadi dari suatu hasil evaluasi analisis dapat menilai apakah suatu proses atau keluaran kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang Lingkup Monitoring & Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 1) Tahap Perencanaan : Didalam pengadaan dari awal perencanaan sudah dilakukan oleh PA/KPA. sayembara/kontes.
- 2) Tahap Pelaksanaan : Dilaksanakan saat lelang pihak yang terkait yaitu PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 3) Tahap Pasca-Pelaksanaan : Dilaksanakan setelah barang/jasa diserahkan, agar dapat melihat apakah output menghasilkan outcome yang diharapkan

2. Sistem Informasi Manajemen melalui E-Monev

E-Monev dimaksudkan hanya untuk memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan praktik lelang atau pengadaan barang/jasa didalam pemerintahan atau dimasing-masing SKPD , dimana para SKPD dapat mengetahui seluruh program yang telan di rencanakan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sistem e-monev khusus dikembangkan agar memenuhi tujuan-tujuan PBJP, seperti peningkatan kinerja stakeholder, pengambilan keputusan strategis bagi PA/KPA, dan membantu memberikan sebuah solusi yang dimana penyedia yang telah terblacklist di instansi atau SKPD lain maka penyedia tersebut tidak bisa melakukan atau mengikuti proses pelelangan atau PBJP. Tujuan e-monev adalah :

- 1) Mengumpulkan informasi dalam bentuk database permasing-masing SKPD secara cepat dan real time.
- 2) Memberikan sebuah laporan dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan ataupun pekerjaan berikutnya
- 3) Memberikan laporan terdeskripsi secara tepat terhadap proses PBJP dari awal perencanaan sampai dengan akhir.
- 4) Memberikan atau membuat pelaporan data realisasi terhadap hasil dari rencana kerja K/L/D/I
- 5) Mendiskripsikan E-Monev hanya untuk memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan praktik lelang atau pengadaan barang/jasa didalam pemerintahan atau dimasing-masing SKPD. Dan

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dilakukan terhadap keseluruhan level struktur kebijakan dengan penekanan yang berbeda, yang dimana proses pengadaan untuk mendukung dari perencanaan kebutuhan pengadaan hingga pelaksanaannya.

Strategis e-monev:

- 1) Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara adil/tidak diskriminasi, terbuka efisien, efektif;
- 2) Sistem E-Procurement nasional terintegrasi dengan e-monev untuk sarana tidak adanya korupsi dan nepotisme;
- 3) Tersusun rencana PBJP dalam pelaksanaan anggaran belanja.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini bahwa Sistem e-Monev dibangun sesuai dengan koridor yang ada, dimana komponen-komponen didalam monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan lelang atau pengadaan di masing-masing SKPD telah termonitor di dalamnya. Sistem Pelaporan didalam aplikasi e-Monev belum terintegrasi dengan aplikasi LPSE permasing-masing SKPD masing-masing instansi yang berbeda. E-Monev dimaksudkan hanya untuk memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan praktik lelang atau pengadaan barang/jasa didalam pemerintahan atau dimasing-masing SKPD. Ditinjau dari literatur dimana, aplikasi e-monev dalam pengawasan proses lelang atau PBJ masih minim, dikarenakan masih kurang minatnya para SKPD dalam aplikasi e-monev, dan masih ada campurtangan kebijakan=kebijakan dari para pengampu. Dengan hal tersebut, besar harapan bahwa Jurnal ini dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam perkembangan aplikasi e-monev dalam PBJP yang bermanfaat dalam memberikan sebuah informasi dari awal perencanaan sampai dengan realisasi PBJP. Dan dengan adanya Monitoring dan Evaluasi didalam PBJP akan menciptakan manfaat nyata bagi stakeholders untuk peningkatan kinerja PBJP dan perencanaan pengadaan yang lebih baik, serta membangun budaya jujur di dalam PBJP

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- [2] Jr, Raymond McLeod, 1997. Sistem Informasi Manajemen Versi Bahasa Indonesia. Prenhallindo, Jakarta.
- [3] Cronbach 1998, Dari Jurnal Moerdiyanto., 2009, Teknik monitoring dan evaluasi (monev) dalam rangka memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Yogyakarta.
- [4] Hafidz, 2008, <http://hafidzf.wordpress.com/2009/06/16/pengertian-monitoring-dan-evaluasi/> diakses 2 Agustus 2012
- [5] Jogiyanto, HM 2005, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta
- [6] Moerdiyanto., 2009, Teknik monitoring dan evaluasi (monev) dalam rangka memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Yogyakarta.
- [7] Keputusan Presiden Republik Indonesia No 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- [8] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah